

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Salim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, halaman. 98.

Alhamdu, *Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan dan Agama, Jurnal*, (Palembang: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, tt), halaman. 9.

Alif Maelani, *Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015), halaman, 21.

Amrah Muslimin, 1980, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Alumni, halaman. 4.

Andi Pitono, “*Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.3, No.1, Maret 2012, halaman. 103.

Arifin, M. Z., & MH, S. (2019), *Konsep Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi*, *Researchgate*, I(1), halaman. 1-5.

Aryan Noverda Safutra, Skripsi: *Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), halaman.52

Bam Departemen Dalam Negeri, 2009), halaman. 25.

Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, halaman. 28.

Hanis, Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Grasindo, halaman. 47

Hartoyo, *Sesuai Kisah Perjuangan 7 Waria Kata Hati* (Jakarta: Rehal Pustaka, 2014), halaman. 104.

Hesti Puspitosari dan Sugeng Pujileksono, *Waria dan Tekanan Sosial*, (Malang: UMM Press), halaman. 9.

Hidayatullah Arief, *Kontribusi Usaha tani Jagung Terhadap Pendapatan Petani di Desa Pulau Damar Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Depok, Fakultas Ekonomi) halaman. 67.

Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), halaman. 13.

Lukman Hakim, *Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah*

Perubahan UUD 1945), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013, halaman. 2.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Depok : PT. Kanisius, 2016), halaman. 180.

Moelong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman. 27.

Numimatul Faidah & Husni Abdullah, “*Religius dan Konsep Diri Kaum Waria*”, JGSI, Vol.04 No.01 (Agustus 2013), halaman. 1.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman. 20.

Sarah, Y., dkk. 2007, *Waria : Kami Memang Ada*. Yogyakarta : Perkumpulan Berencana Indonesia, halaman. 12.

Setya Retnami, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001, halaman. 8.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman. 1-2.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta : PT Grafindo Persada 2004), halaman. 13.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman. 32.

Syamsuddin Haris, 2007, *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta. LIPPI pres, halaman. 52.

Syaukani, HR, Afan Gaffar, Ryass, Rasyid, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Cetakan VII*, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset, halaman.8.

Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, halaman. 122.

Yudhanti, A. D., Agustin, R. W ., & setyanto, A. T. (2017), *Perbedaan Psychological Well Being Pada Waria Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Waria Bukan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Harga Diri Harga Diri, Jual Wacana*. Psikologi.Fk.Uns.Ac.Id, halaman. 83-100.

Jurnal :

Erna Nuraena dan Ade Hadiono,”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak”, *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, halaman. 32.

.Erna Nuraena dan Ade Hadiono,”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kabupaten Lebak”, *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, halaman. 27.

Maris G. Rukmana, S.IP., M.Si, “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”, *Jurnal Konstituen*, Vol.1 No.2, (juni 2019), halaman.75-76.

Muh.Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah”, *Amanna Gappa*, Vol.25 No.2 (September 2017), halaman. 62-63.

Numimatul Faidah & Husni Abdullah, “*Religius dan Konsep Diri Kaum Waria*”, *JGSI*, Vol.04 No.01 (Agustus 2013), halaman. 1.

Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No.3 (2016), halaman. 233.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Sumber Lain :

Wawancara dengan Bapak Fajar Purwoto, S.H., M.M, Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Wawancara dengan Marthen Stevanus Dacosta, A.P., M.A, selaku Sekretaris Satpol PP Kota Semarang

Wawancara dengan Drs. Yoga Utoyo Selaku Kepala Bidang Tibumtranmas Satpol PP Kota Semarang

Wawancara dengan Anthonius Slamet P. Selaku Komandan Regu Penindakan Bidang Tibumtranmas